



# **KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DI DAERAH**

## **Jakarta, 9 April 2020**



oleh :

**Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah**



**MENDAGRI AJAK**  
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama rekan-rekan PMII bersama Alumni Universitas Parahyadina dalam persiapan pembagian 100.000 paket bantuan PHB (Paket Halal Bersih dan Sehat) di Kampus Universitas Parahyadina Jakarta, Kamis (2/4).

# Mendagri Ajak Semua Pihak Perkuat Kerja Sama **Kita Sedang Perang Dengan Musuh Yang Tidak Terlihat**

**Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, menanggulangi virus corona (Covid-19) sama seperti perang. Dia mengajak semua pihak meningkatkan sinergitas untuk memenangkan pertempuran.**

"KITA sedang perang dengan musuh yang tidak nampak. Covid-19 kita serang, pasang, dicuri dan swasta, harus berswasti, atau mendekati dan mengejutkan," ungkap Tito saat rapat via video conference dengan sejumlah jajarannya di Jakarta, kemarin.

Stakeholder yang ikut dalam operasi ini jadi paguyuban sektor 1 (Kementerian), Ketua Kamar Perdagangan dan Industri (KPKI), Kepala Lembaga Kajian Pengembangan Daerah (LKPjD) Romy Deci Susanto, Kabaroskrim Polri Komjen Faruya Sigit, Ketua Kadin Pemerintahan (Kadinpi), Gugus Tugas, Ketua Staf Pengamanan Keamanan dan Pembangunan (DPPK) Muhammad Yusuf Aidi dan sejumlah kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota maupun yang diwakili oleh seketaris dimulai hari ini pagi.

Tito menyatakan, tidak pering di luar negeri lagi. Covid-19 sudah banyak digunakan banyak negara. Misalnya, India menggunakan selah sejauh ini. Selain itu, Inggris dan Amerika, ketua negara, ini juga menggunakan selah sejauh ini.

Tito mengingatkan, perang tidak mengenal slaga tanpa lawan, karya atau misikan, pejabat atau buah hati, tidak mampu perempuan, polisi, tentara, slaga saja

Samalai. Selain membutuhkan 250 juta masker biasa, Yogyakarta membutuhkan 3,2 juta masker Alat Pelindung Diri (APD).

Ketua KPK, Farid Bahrun, menilai pemerintah diberi tugas untuk tidak dilakukan melakuk pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

"Dalam kasus ini, diperlukan pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pelaksanaan tugas dan tuntutan hukum," kata Farid.

Pada menujukkan, pihaknya menyadari di tengah situasi darurat, barang barang dan jasa terkait perang melawan Covid-19 mengalami ketidakstabilan signifikan. Karenanya pemenuhan ini mengalami kendala teknis pada teknologi dan teknologi lainnya. Hal ini membuat kualitas pasar tidak normal. Diharapkan pula, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan dengan mendapatkan harga terbaik (price fixancy).

Pihaknya menjelaskan, Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pun mencakberikan kepada pemenuhan setiap unit bisnis yang bersesuaian (value for money) dan tidak akan ditaruh harga terendah.

Dia menambahkan, KPK seharusnya mendukung Serat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi panduan bagi Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di masa darurat. Selain itu, pihaknya meminta nambo rambe pemerintah korupsi untuk memperbaiki keputusan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

## Baru Cair Rp 8,4 Triliun **Menteri Halim Jengkel Kinerja Kepala Daerah Lel**

**KEMENTERIAN** Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat Dana Desa yang dicanangkan baru Rp 8,4 triliun atau 12 persen dari penganggaran tahun ini sebesar Rp 72,07 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, lamanya pencirian Dana Desa karena Kepala Daerah lambat mempersiapkan permohonan pencairan. Hal ini jengkel dengan kondisi ini. Dapat menghalangi kepala daerah untuk segera mulai jalankan proses pengajuan Dana Desa.

"Saya minta Bapak dan Wakil Ketua segera proses pengajuan Dana Desa maksimal secepatnya," ucap Halim di Jakarta, kemarin.

Halim menuturkan, pencirian Dana Desa sangat penting. Karena Dana Desa bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19. Banyak mitik pencirian ini sebab pengajuan sampai sekarang ini juga masih permasalahan.

"Arahan Bapak Presiden untuk segera dilakukan percepatan pencirian Dana Desa,"

(Perwali) tentang tata cara bagian dan pencirian. Dana Desa sehingga bisa berjalan sesuai dengan APBD.

Sebenarnya ada sejauhnya dampak buruknya memperlambat pencirian Dana Desa sehingga

menunda pembangunan di desa dan kerusakan ekonomi dan sosialnya," kata Halim.

Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM) Mendes PDTT Taufiq Noor membuktikan ketertiban pencirian Dana Desa.

"Ada yang cepat, ad yang terlambat, bahkan ada yang satu minggu yang sampai peluhkan dulu. Namun ada juga yang selesai dalam proses pengajuan sampai sekarang ini juga masih permasalahan," ungkapnya.

Terkait permasalahan Diken PPMD telah berkoordinasi ke Direktorat

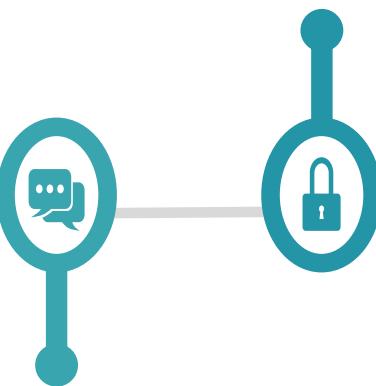
# DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PENANGANAN COVID-19

menerbitkan

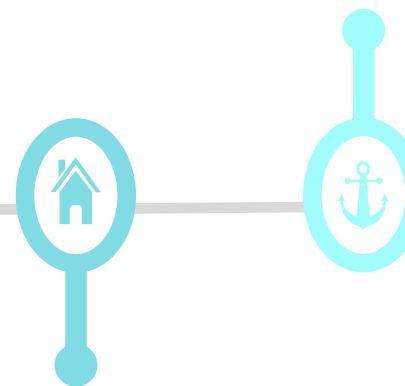
SE Mendagri kepada seluruh Kepala Daerah nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), tanggal **17 Maret 2020**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemda

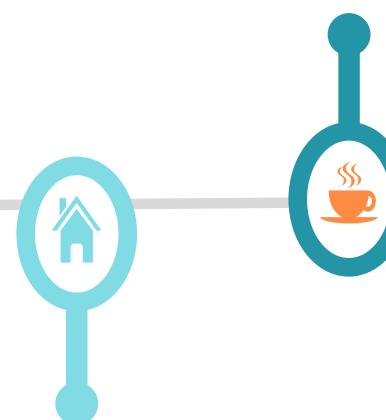
Surat Mendagri kepada seluruh Kepala Daerah Nomor 440/2758/SJ hal Pemetaan Wilayah Rawan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, tanggal **6 April 2020**



Radiogram Mendagri kepada seluruh Kepala Daerah nomor 443.1/2130/SJ terkait Mengantisipasi dan Pencegahan terkait Isu Infeksi Novel Coronavirus (COVID-19), tanggal **4 Maret 2020**



Pedum tentang Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemda (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis,& Manajemen)



Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemda, tanggal **2 April 2020**

**SATU INDONESIA STOP CORONA!!!**

Disiplin, Patuh dan Taat Aturan Cegah Wabah Corona

## Mendagri Tito Karnavian Tegas, Seluruh Kepala Daerah Hanya Diberi Waktu 7 Hari

Sabtu, 04 April 2020 – 08:18 WIB



Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.  
Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com



[jpnn.com](http://jpnn.com), **JAKARTA** - Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur dan bupati/wali kota segera melakukan refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

# Mendagri Fasilitasi Pemda Konsultasi Langsung Dengan KPK Hingga BPK

Penulis: Rojaul

08 April 2020



Foto: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Memfasilitasi Pemda Berkonsultasi Langsung Dengan KPK, BPK, LKPP Dan Bareskrim Polri

## **Hadapi Covid 19, Mendagri Bangun Sinergi Pusat, Dunia Usaha dan Pemda**



**JAKARTA (XNews.id)** – Mendagri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menggelar teleconference bersama seluruh Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah se Indonesia, Selasa (7/4)

Kegiatan teleconference juga menghadirkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Hadir juga Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.



# LAPORAN TIM I

## PENDATAAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENGANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*





## LAPORAN TIM II

# PENDATAAN INDUSTRI DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENGANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



Jakarta, April 2020



*Terima Kasih*

